

Kepemimpinan Politik Yazid bin Muawiyah 680-683 M

Siti Wahidatul Choiriyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Choiriyahida14@gmail.com

Ahmad Nur Fuad

UIN Sunan Ampel Surabaya

nurfuad@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kepemimpinan politik Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah kedua dalam Dinasti Umayyah yang menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Masalah utama dalam penelitian ini adalah konflik internal yang terjadi selama pemerintahannya serta dampaknya terhadap kesatuan umat Islam dan stabilitas kekhalifahan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis gaya kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, serta faktor-faktor yang menyebabkan konflik politik selama masa pemerintahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis-kritis dengan analisis dokumen primer dan sekunder terkait periode kekuasaan Yazid bin Muawiyah (680-683 M). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah diwarnai oleh kontroversi politik yang signifikan, terutama terkait peristiwa Karbala dan pemberontakan di berbagai wilayah kekhalifahan. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun Yazid memiliki visi untuk mempertahankan kekuasaan Umayyah, pendekatan politik yang ditempuhnya justru memperdalam perpecahan dalam komunitas Islam dan memicu gerakan perlawanan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dinamika politik Islam pada periode transisi setelah masa Khulafaur Rasyidin.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Politik, Yazid bin Muawiyah, Legitimasi Kepemimpinan.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah (680–683 M) sering dipandang sebagai salah satu fase paling kontroversial dalam sejarah politik Islam awal. Pokok persoalan yang hendak ditelaah dalam kajian ini ialah persoalan legitimasi serta praktik kekuasaan Yazid dibandingkan dengan pola kepemimpinan para khalifah sebelumnya yang berlandaskan musyawarah. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah pertama dalam Dinasti Umayyah melalui mekanisme penunjukan langsung oleh ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, merupakan perubahan besar dari sistem *syura* yang diwariskan Khulafaur Rasyidun. Perubahan tersebut yang menjadi ciri khas Dinasti Umayyah, bahwa struktur kekuasaan tidak lagi berdasarkan pada kontrak sosial melainkan pada garis keturunan (Hitti, 2013). Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahannya, seperti

tragedi Karbala dan peristiwa Al-Harrah, menimbulkan kecaman yang luas. Hal inilah yang menjadikan figur Yazid sebagai sosok yang terus diperdebatkan, baik dalam wacana politik maupun dalam narasi keagamaan.

Kajian mengenai kepemimpinan Yazid menjadi penting karena kepemimpinannya merepresentasikan perubahan bentuk kekuasaan dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya menandai peralihan dari sistem khilafah normatif ke arah kerajaan Dinasti, tetapi juga mewariskan pola pemerintahan yang memengaruhi jalannya politik Islam di masa sesudahnya (Hamdi, 2021). Catatan *Tarikh al-Tabari* menggambarkan Yazid sebagai khalifah yang memperoleh kekuasaan dengan tekanan politik, sedangkan Ibn Al-Athir dalam *al-Kamil fi al-Tarikh* lebih menekankan sisi moral dan perilaku pribadinya yang merusak citranya di mata umat (Ath-Thabari, 2011). Dengan demikian, meneliti Yazid berarti menyingkap akar konflik politik sekaligus perbedaan penulisan sejarah dalam tradisi Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan politik Yazid bin Muawiyah dengan menempatkan dua sumber besar, yaitu riwayat Al-Thabari dan catatan Ibn Al-Athir, sebagai landasan perbandingan. Fokus utama pembahasan ialah melihat bagaimana kedua sejarawan besar ini menggambarkan masa kepemimpinan Yazid dengan pendekatan yang berbeda. Argumen pokok yang hendak dibuktikan ialah bahwa meskipun kedua sumber tersebut sama-sama mengakui fakta kekuasaan Yazid, penilaian politik dan moral yang muncul menunjukkan kontras yang mencolok. Karena itu, Yazid bukan hanya sekadar figur sejarah, melainkan juga simbol transisi politik dan sumber perdebatan panjang yang terus dipelihara oleh tradisi historiografi Islam (Quadri, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan historiografi. Sumber primer utama adalah *Tarikh al-Tabari* dan *al-Kamil fi al-Tarikh* Ibn Al-Athir. Artikel ini menggunakan konsep legitimasi otoritas dari Max Weber. Weber mengklasifikasikan legitimasi kekuasaan ke dalam tiga kategori dasar: tradisional, yang bergantung pada tradisi warisan dan kebiasaan; karismatik, yang didasari oleh daya tarik pribadi sang pemimpin, serta rasional-legal yang berpijak pada prosedur dan regulasi formal. Pada periode awal Islam, para Khalifah Rasyidun mencerminkan bentuk legitimasi karismatik yang kokoh, di mana pemilihan pemimpin dilakukan lewat konsultasi komunal guna mempertahankan kemurnian wewenang ilahi. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta penelitian akademik modern dipakai sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks kontemporer (Ismail, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menempatkan Yazid sebagai tokoh sejarah, tetapi juga mengungkap cara para sejarawan menyusun dan memberi makna atas kepemimpinannya.

Struktur penulisan artikel ini dibagi ke dalam lima bagian utama. Bagian pertama berisi pengantar mengenai konteks transisi politik dari masa Khulafaur Rasyidun menuju Dinasti Umayyiah. Bagian kedua menguraikan proses pengangkatan Yazid sebagai khalifah beserta problem legitimasi yang menyertainya. Bagian ketiga menyoroti peristiwa penting yang terjadi selama masa pemerintahannya, termasuk tragedi Karbala dan peristiwa al-Harrah. Bagian keempat menyajikan perbandingan antara deskripsi

kepemimpinan Yazid dalam *Tarikh al-Tabari* dan *al-Kamil fi al-Tarikh* Ibn al-Athir. Terakhir, bagian kelima menutup dengan kesimpulan yang menegaskan karakter kepemimpinan Yazid serta dampaknya terhadap perkembangan sejarah politik Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi Politik dari Khulafaur Rasyidun ke Dinasti Umayyah

Periode Khulafaur Rasyidun (632–661 M) dikenal sebagai masa kepemimpinan yang menekankan musyawarah dalam menentukan pengganti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dipilih melalui baiat di Saqifah Bani Sa'adah, sementara Umar bin Khattab diangkat lewat wasiat Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat. Utsman bin Affan terpilih melalui musyawarah yang dibentuk Umar sebelum wafat, sedangkan Ali bin Abi Thalib dibiayai setelah terbunuhnya Utsman di tengah situasi yang penuh gejolak. Model kepemimpinan ini menunjukkan adanya kontrak sosial antara pemimpin dengan umat, sehingga legitimasi seorang khalifah bertumpu pada kesepakatan bersama dan bukan sekadar garis keturunan (Hamdi, 2021).

Akan tetapi, sistem musyawarah itu tidak lagi berjalan mulus pada masa Ali bin Abi Thalib. Perselisihan internal, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, memperlemah wibawa pemerintahan pusat. Dalam kondisi tersebut, Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat gubernur Syam mulai menantang legitimasi khalifah dan membangun basis kekuatan politiknya (Hitti, 2013). Setelah Ali wafat, kepemimpinan berpindah sebentar kepada Hasan bin Ali, namun ia memilih berdamai dengan Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah lebih luas. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan '*Am al-Jama'ah*' (tahun persatuan), yang menandai awal kekuasaan penuh Muawiyah sebagai khalifah tunggal (Setiawan, 2020).

Berbeda dengan tradisi sebelumnya, Muawiyah memperkenalkan pola baru dalam kekuasaan. Ia menunjuk anaknya, Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti melalui mekanisme wasiat. Langkah ini dianggap keluar dari prinsip *syura* yang diwariskan pada masa Khulafaur Rasyidun. Sejak saat itu, sistem pemerintahan Islam mulai beralih menjadi monarki turun-temurun yang berpijak pada kekuasaan keluarga, bukan pada konsensus umat (Hamdi, 2021). Banyak sejarawan menilai keputusan Muawiyah ini sebagai titik balik, yang memang berhasil menjaga stabilitas politik sesaat, tetapi sekaligus meruntuhkan idealisme khilafah yang berlandaskan musyawarah (Al-Maududi, 2007).

Peralihan dari Khulafaur Rasyidun ke Dinasti Umayyah dengan demikian tidak sekadar pergantian pemimpin, tetapi sebuah transformasi besar dalam struktur politik Islam. Dari sistem kepemimpinan kolektif berbasis legitimasi umat, kekuasaan berubah menjadi otoritas dinasti yang bertumpu pada garis keturunan dan kekuatan militer (Hamdi, 2021). Pergeseran inilah yang menjadi latar belakang penting untuk memahami munculnya kontroversi pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, yang kemudian menghadapi tantangan besar berupa penolakan politik hingga tragedi berdarah Karbala dan al-Harrah.

Pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai Khalifah dan Problem Legitimasi Politik

Peresmian Yazid sebagai khalifah kedua dalam Dinasti Umayyah menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah politik Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan setelah berhasil mengakhiri konflik sejarah panjang dengan Ali bin Abi Thalib. Ia memutuskan untuk menetapkan anaknya sebagai penerus. Kebijakan ini membawa kosekuensi besar karena berbeda dari tradisi Khulafur Rasyidun yang mengutamakan *syura*. Sejarawan menilai bahwa langkah muawiyah merupakan awal dariterbentuknya sistem monarki Islam yang diwariskan melalui keluarga, bukan melalui konsesus umat bagaimana sebelumnya (Aldina & Hertina, 2017). Dari keputusan tersebut bisa menjadi titik institusionalisasi monarki dalam Islam, di mana kekuasaan beralih menjadi milik dinasti tertentu.

Respon terhadap pengangkatan Yazid tidak seragam. Di wilayah Syam dan sekitarnya, baiat terhadap Yazid berlansung relatif lancar karena kuatnya pengaruh dari Muawiyah. Akan tetapi di Hijaz, terutama di Mekkah dan Madinah, muncul gelombang penolakan dari kalangan sahabat dan para tokoh besar Islam. Diantaranya ada Abdullah bin umar, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar, serta Husain bin Ali. Mereka menolak mengakui legitimasi Yazid karena mereka berpendapat bahwa jabatan khalifah dipilih melalui musyawarah dan pertimbangan moral, bukan untuk diwariskan (Aldina & Hertina, 2017). dalam *Tarikh At Thabari* menunjukkan bahwa adanya tekanan dari pihak istana untuk mempercepat baiat kepada Yazid, meski penolakan keras dari tokoh-tokoh Hijaz.

Penolakan paling menonjol dari sikap Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Husain, yang memiliki kedudukan istimewa sebagai cucu Nabi, memilih tidak tunduk kepada kekuasaan Yazid. Dukunagn penuh dari penduduk Kufah membuatnya datang ke Irak, namun perjalanan berakhir dengan adanya tragedi Karbala 61 H/680 M. peristiwa tersebut tidak hanya mencontreng citra Yazid, tetapi juga memperdalam polarisasi dan teologi dalam umat Islam. Abdullah bin Zubair bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah di Mekkah setelah wafatnya Yazid. Hal tersebut menunjukkan bahwa problem legitimasi Yazid tidak benar-benar selesai sepanjang pemerintahannya (At-Thabari, 2011).

Peristiwa pengangkatan Yazid sebagai khalifah menimbulkan pergeseran besar dalam sistem politik Islam. Empat tokoh sahabat senior yang menolak baiat menjadi bukti nyata bahwa seksesi tersebut tidak berlandaskan kesepakatan. Disisi lain Yazid juga menggunakan cara-cara ancaman politik demi memastikan ia diterima sebagai khalifah, yang justru menambh ketidakpuasan umat (Hassan, 2012). Hal tersebut menjelaskan mengapa pemerintahan Yazid selalu dalam bayang-bayang delegitimasi.

Dengan demikian, Yazid secara *de facto* berhasil menduduki kekuasaan, secara *de jure* banyak kalangan menganggapnya tidak sah. Legitimasi politiknya rapuh sejak awal masa pemerintahannya, sehingga setiap perlawanan yang muncul menimbulkan pemberontakan besar. Tragedi Karbala dan Al Harrah menjadi bukti bahwa penetapan Yazid sebagai khalifah menimbulkan luka sejarah yang panjang. Ia tidak pernah dilihat

sebagai penerus Muawiyah, tetapi juga sebagai simbol pergeseran politik Islam dari khilafah berbasis *syura* menuju sisten kerajaan monarki (Hitti, 2013).

Peristiwa Penting dalam Masa Pemerintahan Yazid bin Muawiyah: Karbala dan Al- Harrah

Masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah berlangsung selama tiga tahun, namun diwarnai dengan peristiwa besar yang menentukan citranya dalam sejarah Islam, yakni tragedi Karbala dan Al-Harrah. Peristiwa tersebut memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, sekaligus menegaskan bahwa sistem kepemimpinannya yang berbasis monarki gagal meraih dukungan penuh dari kaum muslim. Para sejarawan seperti At-Thabari dan Ibn Al-Athir menuliskan peristiwa-peristiwa tersebut, meskipun dari sudut pandng yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan historiografis yang beragam (Rowson, 1989).

1. Tragedi Karbala

Tragedi Karbala yang terjadipada tahun 61 H/680 M merupakan peristiwa paling legendaris dalam sejarah pada masa pemerintahan Yazid. Setelah wafatnya Muawiyah, Yazid menuntut untuk segera di baiat dari tokoh-tokoh utama di wilayah Hijaz, termasuk Husain bin Ali. Akan tetapi, Husain menolak untuk tunduk pada pemerintahan Yazid yang dianggap tidak sah karena berasal dari pewarisan keluarga, bukan dari musyawarah bersama umat. Dorongan dari penduduk Kufah semakin memperkuat tekad Husain yang mendorongnya untuk segera berangkat ke Irak bersama kerabat dan pendukung setia (At-Thabari, 2011).

Puncak peristiwa yang terjadi pada hari Asyura 10 Muharram 61 H (680 M), di mana perjalanan Husain dan sekitar 72 pengikutnya termasuk kleurga dan sahabat setianya yang dikelilingi ribuan pasukan Umayyah, yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sebelum pertempuran pecah, Air sungai diblokir yang menyebabkan penderitaan kehausan. Husain dan keluarganya dibantai secara kejam, anak-anak dan para wanita ditangkap sebagai tawanan dan dibawa ke Damaskus (At-Thabari, 2011). perilaku Yazid dan pejabatnya memicu kemarahan yang besar, karena keturunan Nabi tumbang di tangan pasukan muslim sendiri (Al-Athir, 1885). Peristiwa tersebut tidak hanya merusak reputasi Yazid tetapi juga meletakkan dasar bagi identitas politik serta ideologis syiah, yang menjadikan Karbala sebagai simbol perjuanagan melawan penindasan.

Dalam peristiwa Karbala mencerminkan keridakmampuan Yazid dalam membangun pondasi politik yang kuat (Hitti, 2013). Kekerasan yang ditimbulkan memicu adanya trauma historis yang mendalam dan perpecahan. Peristiwa Karbala sudah melampaui konflik politik, ia mengubah persaingan kekuasaan menjadi pertarungan ideologis yang membagi umat islam.

2. Peristiwa Al-Harrah

Peristiwa Al-Harrah terjadi pada 63 H/683 M di madinah yang menjadi catatan bersejarah pada masa pemerintahan Yazid. penduduk Madinah, yang mencakup sahabat

Nabi dan para tabiin, menolak memberikan kesetiaan karena menilai kehidupan dalam kemewahan dan perilaku Yazid yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Mereka mengusir keluarga Umayyah dari Madinah dan menyatakan secara terbuka untuk pemutusan hubungan baiat (Hassan, 2012).

Akibat pemberontakan tersebut Yazid membalas dengan mengirimkan pasukan besar dibawah komandi Muslim bin Uqbah. Bentrokan terjadi di daerah Harrah, tak jauh dari Madinah dan berakhir dengan kemenangan pasukan Yazid (Al-Athir, 1885). Tentara Yazid tidak berhenti dalam penumpasan pemberontakan. Mereka melakukan perampasan, kekerasan fisik, bahkan pelanggaran terhadap kerormatan yang mengguncang status kota suci tersebut (Al-Athir, 1885).

Kerusuhan ini semakin membuat nama Yazid bin Umayyah semakin buruk di kalangan umat muslim. Alih-alih menegakkan otoritas, tindakan tersebut dipandang sebagai penghinaan terhadap kota suci dan melanggar moralitas seorang pemimpin. Tragedi Al-Harrah sebagai bukti bahwa pemerintahan Yazid lebih mengandalkan pada kekuatan militer ketimbang dukungan moral dari masyarakat, yang pada akhirnya meruntuhkan otoritasnya di mata masyarakat (Hitti, 2013).

3. Analisis Historiografis

Catatan sejarah dari Al-Thabari dan Ibn Al-Athir, turut menuliskan kisah kedua peristiwa tersebut dengan pendekatan berbeda. Al-Thabari menyajikan catatan sejarah kedua peristiwa tersebut dengan beragam riwayat dari saksi mata dan perawi, tanpa banyak memberikan penilaian moral dan lebih bersifat kronologis. Ibn Al-Athir menekankan sisi moral yang menggambarkan Yazid sebagai penguasa yang tidak mampu menjaga martabat umat Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penulisan sejarah Islam bukan hanya sekedar catatan peristiwa, melainkan sebagai cerminan dan perspektif politik dan moral dari masing-masing sejarawan (Hugh Kennedy, 2016).

Pendekatan yang berbeda memperlihatkan bahwa penulisan sejarah Islam bukan sekedar penyampaian peristiwa, tetapi juga refleksi dari pandangan moral dan politik dari masing-masing penulis. Dari analisis historiografi kontemporer, kedua peristiwa tersebut menjelaskan ketidakstabilan legitimasi Yazid yang dibangun di atas pondasi yang rapuh. Ia berkuasa secara politik, tetapi kehilangan dukungan moral dari umat. Dengan demikian, Tragedi Karbala dan Al-Harrah tidak hanya menggambarkan kegagalan seorang penguasa, melainkan sebagai penanda perubahan besar dalam kepemimpinan Islam dari sistem Khalifah menuju sistem monarki (Madelung, 1997).

Pebandingan Deskripsi Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dalam *Tarikh Al-Thabari* dan *Al-Kamil Al-Tarikh* Ibn Al-Athir

Dalam kajian kepemimpinan Yazid bin Muawiyah tidak bisa lepas dua karya besar historiografi Islam, yakni *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* karya Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari dan *al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn al-Athir. Keduanya merupakan sumber utama dalam studi sejarah Islam Klasik yang sama-sama menuliskan masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Meskipun memaparkan peristiwa yang sama,

terutama pada Tragedi Karbala dan Al-Harrah. Namun, kedua penulis tersebut menyajikan dengan gaya kepenulisan yang berbeda. Perbedaan mencerminkan dari sisi latar sosial, politik, serta penilaian moral. Tujuan kepenulisan yang mengungkap nuansa interpretasi historis yang dipengaruhi dari masing-masing penulis. Al-Thabari, sebagai sejarawan kontemporer relatif dengan peristiwa Umayyah, cenderung menyajikan narasi dari variasi riwayat, sementara Al-Athir, sang penulis beberapa abad kemudian lebih selektif dalam merangkum untuk menekankan pelajaran etis (Rowson, 1989).

Deskripsi Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah pada Tarikh Al-Thabari

Al-Thabari menuliskan kepemimpinan Yazid sebagai periode transisi yang penuh problem, di mana warisan kepemimpinan sang ayah, Muawwiyah bin Abu Sufyah mulai retak dibawah tekanan politik. Yazid naik tahta pada 60 H/680 M setelah kematian Muawwiyah, dan Al-Thabari menuliskan singkat masa kepemimpinan Yazid, hanya tiga tahun 680 M-683 M, melalui serangkaian riwayat dari berbagai perawi, termasuk yang pro dan anti-Umayyah (Al-Thabari, 2011). Ia menyoroti Yazid sebagai pemimpin yang mewarisi sistem birokrasi kuat, tetapi kurang dalam karisma pribadi untuk menyatukan umat.

Salah satu kisah yang menjadi sorotan adalah pada Tragedi Karbala. Al-Thabari merinci perintah Yazid kepada gubernur Ubaidillah bin Ziyad untuk menekan pemberontakan Husain bin Ali, meskipun ia tidak secara eksplisit menyalahkan Yazid atas pembunuhan massal tersebut. Sebaliknya, al-Tabari menyajikan narasi yang netral, seperti riwayat dari Abu Mikhnaf yang menggambarkan Yazid sebagai sosok yang awalnya enggan, tapi akhirnya menerima hasilnya dengan sikap acuh tak acuh, bahkan disebutkan bahwa Yazid menyesali peristiwa itu setelah melihat kepala Husain dibawa ke Damaskus (Al-Thabari, 2011). Dalam hal pemerintahan sehari-hari, Al-Thabari mencatat kebijakan Yazid yang melanjutkan ekspansi militer, seperti penaklukan Konstantinopel yang gagal, dan upaya menekan oposisi di Hijaz melalui pelepasan jabatan gubernur seperti Walid bin Utbah di Madinah (Al-Thabari, 2011). karya Al-Thabari bersifat deskriptif, menghindari penilaian moral langsung, sehingga pembaca diajak untuk menyimpulkan sendiri apakah Yazid adalah tiran atau korban intrik politik. Ini mencerminkan metodologi Al-Thabari yang mengumpulkan isnad tanpa filter ideologis yang kuat, meskipun latar belakang Syiahnya mungkin menyiratkan simpati halus terhadap Ahl al-Bayt. (Hugh Kennedy, 2016)

Deskripsi Kepemimpinan Yazid dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh Ibn Al-Athir

Ibn Al-Athir menulis *Al-Kamil fi Al-Tarikh* hampir tiga abad setelah masa Al-Thabari. Ia hidup dalam suasana politik yang berbeda, di mana kekuasaan Abbasiyah mulai melemah dan pandangan kritis terhadap Umayyah lebih terbuka. Hal ini memengaruhi gaya penulisannya yang lebih reflektif dan moralistik. Dalam karyanya, Ibn Al-Athir tidak sekadar menyalin kronologi peristiwa, tetapi juga memberikan penilaian etis terhadap tokoh-tokoh yang terlibat. Ia menyebut Yazid sebagai pemimpin yang mewarisi tahta melalui warisan Dinasti, bukan *Syura*. Yazid juga dinilai yang gagal

menjaga amanah kekuasaan dan kehilangan legitimasi di mata umat karena perilaku politiknya yang keras dan penuh intrik (Al-Athir, 1885).

Peristiwa Karbala menjadi pusat kritik Ibn al-Athir, ia secara tegas menyalahkan Yazid atas perintah pembantaian Husain, mengutip riwayat yang menggambarkan Yazid sebagai pemabuk dan penjudi yang merayakan kemenangan dengan cara tercela, seperti memerintahkan penyanyi di istana saat kepala Husain tiba (Al-Athir, 1885). Berbeda dengan Al-Thabari, Ibn Al-Athir tidak ragu untuk menyisipkan penilaian etis, menyebut Yazid sebagai "zalim" yang memicu perpecahan umat. Dalam konteks pemerintahan, Ibn Al-Athir merangkum kebijakan Yazid sebagai kelanjutan tirani, termasuk penindasan terhadap pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah dan pembakaran Ka'bah, yang dilihatnya sebagai salah satu puncak peristiwa (Al-Athir, 1885). Demikian pula dalam penjelasannya mengenai peristiwa al-Harrah di Madinah, Ibn Al-Athir menulis dengan nada kecaman yang tajam. Ia menggambarkan bahwa pasukan Yazid telah melanggar kehormatan kota Nabi dan melakukan penindasan terhadap penduduknya. Tindakan ini, menurutnya, merupakan bukti bahwa pemerintahan Yazid tidak hanya kehilangan legitimasi politik, tetapi juga nilai-nilai spiritual Islam. Ibn Al-Athir menilai bahwa pemerintahan yang berlandaskan ketakutan dan kekerasan tidak akan pernah bertahan lama karena kehilangan kepercayaan rakyat (Al-Athir, 1885). Masa pemerintahannya digambarkan singkat karena "amarah Tuhan" yang menghukumnya dengan kematian mendadak pada 64 H/683 M. Pendekatan Ibn Al-Athir lebih naratif dan selektif, memilih riwayat yang memperkuat tema moralitas, yang mungkin dipengaruhi oleh konteks zamannya di mana Umayyah sering dijadikan simbol kemerosotan politik.

Persamaan dan Perbedaan dalam Tarikh Al-Thabari dan Al-Kamil fi Tarikh Ibn Al-Athir

Dari kepenulisan dua karya sejarawan bahwa kepemimpinan Yazid ditandai oleh instabilitas, dengan Tragedi Karbala sebagai titik balik yang memicu pemberontakan luas dan melemahkan Umayyah. Mereka juga mencatat keberhasilan militer terbatas, seperti penguatan perbatasan, meskipun gagal dalam ekspansi besar. Yazid juga merupakan tokoh yang berada di antara legitimasi politik dan krisis moral, antara kebutuhan menjaga stabilitas dan kegagalan menegakkan keadilan.

Jika dibandingkan, perbedaan mendasar antara kedua sejarawan ini terletak pada tujuan penulisan dan kerangka moral yang mereka gunakan. Al-Thabari menulis sejarah untuk merekam fakta, sementara Ibn al-Athir menulis sejarah untuk memberikan pelajaran. Al-Tabari mengedepankan *objektivitas naratif* sebuah sikap untuk tidak menilai secara langsung, sedangkan Ibn Al-Athir menonjolkan *subjektivitas moral*, di mana sejarah menjadi medium kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya sepakat bahwa masa Yazid menandai perubahan sistem politik Islam, tetapi berbeda dalam menilai konsekuensi dari perubahan tersebut. Al-Tabari melihatnya sebagai hasil evolusi politik yang tak terhindarkan, sedangkan Ibn al-Athir memandangnya sebagai kemunduran spiritual akibat melemahnya prinsip syura dan tanggung jawab sosial penguasa (Hitti, 2013).

Melalui kajian mendalam terhadap kedua karya historiografi tersebut, tampak jelas bahwa persepsi terhadap sosok Yazid bin Muawiyah tidak dapat disederhanakan menjadi satu penilaian tunggal. Ia menempati posisi ambivalen, di satu sisi berusaha mempertahankan kestabilan politik, namun di sisi lain menghadapi krisis legitimasi moral yang melemahkan wibawanya sebagai pemimpin. Baik Al-Thabari maupun Ibn Al-Athir, meskipun berbeda dalam pendekatan dan gaya penulisan, sama-sama menampilkan gagasan besar bahwa perjalanan sejarah Islam senantiasa berputar antara dua poros utama kekuasaan dan nilai etika. Dari titik pandang inilah figur Yazid memperoleh maknanya, bukan sekadar bagian dari narasi sejarah, tetapi sebagai simbol reflektif tentang keseimbangan antara otoritas, tanggung jawab, dan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar bagi kepemimpinan dalam Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah tidak dapat dinilai semata dari aspek keberhasilannya mempertahankan kekuasaan, tetapi harus dipahami dalam kerangka legitimasi moral dan politik yang menyertainya. Pembahasan bagaimana legitimasi Yazid terbentuk dan bagaimana citranya direpresentasikan dalam karya Al-Thabari serta Ibn Al-Athir memperoleh jawaban yang jelas. kekuasaannya berdiri di atas pondasi politik dinasti yang melemahkan prinsip *syura*, sementara penerimaan umat terhadapnya tidak pernah bersifat utuh.

Perbandingan antara dua sejarawan besar Islam menunjukkan bahwa narasi sejarah tidak hanya berfungsi sebagai catatan peristiwa, tetapi juga sebagai sarana kritik terhadap penyimpangan nilai dalam praktik kekuasaan. Al-Thabari menghadirkan Yazid melalui sudut pandang politik dan kronologis, sedangkan Ibn Al-Athir menempatkannya dalam konteks moral dan kemanusiaan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa sejarah Islam selalu bergerak dalam ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas dan tuntutan etika kepemimpinan.

Dengan demikian, merupakan refleksi dari perubahan paradigma kekuasaan dalam Islam awal, dari sistem yang berlandaskan legitimasi kolektif menuju struktur dinasti yang berorientasi pada pewarisan. Ia bukan sekadar tokoh kontroversial, melainkan simbol tentang bagaimana kekuasaan tanpa dasar moral yang kuat akan kehilangan kepercayaan dan meninggalkan luka panjang dalam sejarah umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Athir, I. (1885). *al-Kāmil fī al-tārīkh _ li-Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī -- Ibn al-Athīr, ‘Izz al-Dīn, 1160-1233 -- Egypt, 1885 -- Maṭba‘at Muḥammad Muṣṭafá, 1303 [1885]*.
- Al-Maududi, A. A. (2007). *Khilafah dan Kerajaan: Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap “Kerajaan” Bani Umayyah dan bani Abbas* (M. A. Rais (ed.)).
- Aldina, C. S., & Hertina, D. Y. (2017). *Khalifah Yazid bin Mu’awiyah (60-63 H/680-683 M)*. 1.

- At-Thabari, M. bin J. (2011). *Terjemah Shahih Tarikh Ath-Thabari jilid 4&5* (M. bin T. Al Barzanji (ed.)). PUSTAKA AZZAM.
- Ath-Thabari, I. (2011). Shahih Tarikh Ath-Thabari jilid 1. In T. M. bin T. Al-Barjanzi (Ed.), *Jakarta Selatan: Pustaka Azzam*. Pustaka Azzam.
- Hamdi, M. R. (2021). Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulafaurrasyidun (Studi Terhadap Pengangkatan Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai Khalifah Ke-2 Dinasti Umayyah). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 24–38.
- Hassan, T. bin H. (2012). *Pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah (41-132H = 661-750M)*. Jahabersa.
- Hitti, P. K. (2013). History of the Arabs:From the Earliest Times to the Present. In R. C. L. Yasin, D. S. Riyadi, & (Penerjemah) (Eds.), *The Muslim World* (10th ed., Vol. 27, Issue 4). Serambi Ilmu Semesta.
- Hugh Kennedy. (2016). *The Prophet and the Age of the Caliphates Third Edition* (third). Routledge Taylor & Francis Group.
- Ismail, I. (2023). *Gerakan Penolakan Husein Bin Ali Terhadap Pemerintahan Yazid Bin Muawiyah*. Universitas Alauddin Makassar.
- Madelung, W. (1997). The succession to Muhammad A study of the early caliphate. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Quadri, S. mir asedullah. (2024). *history of islam YAZID BIN MUAWIYA*. 2, 306–312.
- Rowson, E. K. (1989). *The History of al-Tabari VOLUME XXII (Ta'rikh al-rusul wa'-muluk), The Marwanid Restoration* (S. A. Arjomad (ed.)). State University of New York Press.
- Setiawan, A. M. (2020). Transisi Sistem Pemerintahan : al-Khulafa al-Rashidun ke Dinasti Umayyah Masa Yazid Bin Muawiyah (661-683 M). *Tsaqofah Dan Tarikh*, 4(2), 110.